

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

J. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

K. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Ruang lingkup penelitian mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet. Untuk memperoleh data guna mendukung penulisan penelitian ini, penulis melakukan survei penelitian pada KPP Pratama Tebet mulai dari bulan Maret sampai dengan April 2015.

L. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai responden penelitian. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi dan terkumpul atau kembali, maka dapat diperoleh data yang menjelaskan persepsi responden terhadap penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

M. Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2011:241). Populasi dalam penelitian ini adalah 83.516 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dalam hal ini:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (10%)

Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin*, hasil perhitungannya adalah sebesar 99,8 dan dibulatkan menjadi 100. Jadi, sampel yang diambil yaitu 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

N. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Data ini menggunakan data primer, yang diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai responden penelitian. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju. Untuk mempermudah melihat frekuensi jawab dari responden atas masing-masing variabel yang ada di dalam kuesioner, maka setiap indikator diklasifikasikan dan diberi skor sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Pengukuran

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Suminarsasi dan Supriyadi (2011)

Variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada empat yang terdiri dari tiga variabel independen atau variabel bebas yaitu keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak serta satu variabel dependen atau variabel terikat yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah penggelapan pajak (*tax evasion*).

a. Definisi Konseptual

Mardiasmo (2011:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

b. Definisi Operasional

Penggelapan pajak (*tax evasion*) diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), yaitu:

- 1) Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan WP.
- 2) Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan penggelapan pajak.

- 3) Integritas atau mentalitas aparaturnya perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak.
- 4) Konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

Variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) diukur dengan lima item pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan 10 pilihan jawaban yang terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keadilan (X_1), Diskriminasi (X_2), dan Pemeriksaan Pajak (X_3).

a. Keadilan

1) Definisi Konseptual

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Akan tetapi prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, belum tentu adil jika dilihat dari sisi lain (Pudyatmoko, 2009:41-42) dalam Marlina (2012).

2) Definisi Operasional

Keadilan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Marlina (2012), yaitu:

- a) Prinsip kemanfaatan/kenikmatan.
- b) Teori daya pikul, yakni kemampuan membayar kewajiban pajak.
- c) Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemugutan pajak.
- d) Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak.
- e) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Variabel keadilan diukur dengan 10 item pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

b. Diskriminasi

1) Definisi Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

2) Definisi Operasional

Diskriminasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), yaitu:

- a) Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial.
- b) Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Variabel diskriminasi diukur dengan 8 item pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

c. Pemeriksaan Pajak

1) Definisi Konseptual

Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010:66).

2) Definisi Operasional

Pemeriksaan pajak diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Ayu (2011), yaitu:

- a) Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum.
- b) Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.

Variabel keadilan diukur dengan 7 item pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Tabel III.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sumber Indikator
Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip kemanfaatan /kenikmatan 2. Teori daya pikul, yakni kemampuan membayar kewajiban pajak. 3. Keadilan horizontal dan keadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP akan merasakan manfaat dari membayar pajak apabila uang yang bersumber dari pajak tersebut digunakan secara baik dan benar untuk fasilitas umum ataupun yang lainnya. 2. Tarif pajak yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan 	Marlina (2012)

	<p>vertikal dalam pemugutan pajak.</p> <p>4. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak.</p> <p>5. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.</p>	<p>WP.</p> <p>3. Keadilan horizontal berarti bahwa besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh WP.</p> <p>4. Dengan melihat proses dan hasil akhir penyusunan undang-undang perpajakan maka WP dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan.</p> <p>5. Negara atau pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik agar WP merasa diperlakukan dengan benar.</p>	
Diskriminasi	<p>1. Pendiskriminasi atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial.</p> <p>2. Pendiskriminasi terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.</p>	<p>1. Perlakuan yang tidak seimbang terhadap WP, baik perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti berdasarkan ras, agama, budaya, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.</p> <p>2. Kebijakan fiskal luar negeri yang berkaitan dengan kepemilikan NPWP, adanya zona bebas pajak, serta kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai pengurangan kewajiban perpajakan hanya menguntungkan</p>	<p>Suminarsasi dan Supriyadi (2011)</p>

		sebagian kelompok dan menimbulkan kecemburuan kepada sebagian WP.	
Pemeriksaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum. 2. Diterapkan pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP akan patuh membayar pajak dan menjalankan sesuai prosedur agar tidak melanggar hukum dan dikenakan sanksi denda. 2. Pemeriksaan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan agar dapat mendeteksi apakah terdapat WP yang melakukan kecurangan atau tidak. 	Ayu (2011)
Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan WP. 2. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan penggelapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tarif pajak yang benar dan adanya kerjasama antara fiskus dengan wajib pajak akan mengurangi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP. 2. WP akan berfikir bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis untuk dilakukan apabila hukum yang mengatur sangat lemah. 3. Bagaimana kinerja pelayanan fiskus serta terdapatnya diskriminasi sangat mempengaruhi perilaku WP dalam membayar pajaknya. 4. Penggelapan pajak merupakan salah satu imbas dari tarif pajak 	Suminarsasi dan Supriyadi (2011)

	<p>n pajak.</p> <p>3. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/ fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak.</p> <p>4. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak.</p>	<p>yang tinggi untuk WP yang memiliki penghasilan besar.</p>	
--	---	--	--

Sumber: Data Diolah Penulis (2015)

O. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat

dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:47-48).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Selain itu, dilengkapi dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Model

Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011:105-106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi

variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas (Elmiza, Fauziati, dan Yunilma, 2014).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu keadilan, diskriminasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dalam hal ini:

Y = Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

β_1 = Koefisien Regresi Keadilan

β_2 = Koefisien Regresi Diskriminasi

β_3 = Koefisien Regresi Pemeriksaan Pajak

X_1 = Keadilan

X_2 = Diskriminasi

X_3 = Pemeriksaan Pajak

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila $X=0$)

e = *error* yang ditolerir (5%)

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: keadilan, diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya.

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:101).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: keadilan, diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2011:98).

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R²*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak serta pengaruhnya terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Nilai (*Adjusted R²*)

mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R²* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R²*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).